

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

Mia Dewi Kusmiati¹
Tina Cahya Mulyatin²
Nova Chalimah Girsang³

STISIP BINA PUTERA, BANJAR, INDONESIA¹

STISIP BINA PUTERA, BANJAR, INDONESIA²

STISIP BINA PUTERA, BANJAR, INDONESIA³

dewikusmiatimia@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat akan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan bernilai melalui pemilihan Sampah dari rumah dan program menabung Sampah di Bank Sampah terdekat sehingga pelayanan pengangkutan sampah yang Residu ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara diantaranya dengan wawancara secara lebih mendalam dengan informan, cara studi dokumentasi serta mengumpulkan data dari sumber lainnya. Selain itu teknik pengambilan informan menggunakan Teknik purposive sampling dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis, pada Pengenalan karakteristik sampah dan metode pembuangannya, Merencanakan dan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu serta Memisahkan peran pengaturan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan merencanakan program kegiatan yang dapat mencapai program *zero waste*, Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dapat dikatakan masih belum maksimal dan masih diperlukan upaya yang lebih kuat dengan ketersediaan anggaran serta melibatkan pihak swasta.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Waste management that involves the active role of the community in empowering the community will create a clean, healthy and valuable environment through selecting waste from home and a waste saving program at the nearest waste bank so that the service of transporting residual waste to the final waste processing site (TPA) can increase local original income. (PAD). The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive methods, data collection techniques in this research use several methods including more in-depth interviews with informants, documentation studies and collecting data from other sources. Apart from that, the technique for taking informants uses purposive sampling technique and the analysis method used is the descriptive analysis method. Based on the research results, Community Empowerment in Waste Management to Increase Regional Original Income (PAD) in Ciamis Regency, in introducing the characteristics of waste and disposal methods, planning and implementing integrated waste management and separating the roles of regulation and supervision have been implemented well, while planning the program activities that can achieve a zero waste program. It can be said that the development of waste management technology is still not optimal and stronger efforts are still needed with budget availability and involving the private sector.

Keywords: *Waste Management, Community Empowerment and Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Penuhnya kapasitas pada pembuangan akhir sampah di beberapa wilayah menjadi tanda bahwa pengelolaan sampah di Indonesia sedang berada di dalam titik kritis. Hal ini kemudian diperparah dengan banyaknya timbulan sampah tanpa pengelolaan yang optimal sehingga menimbulkan sejumlah persoalan lingkungan, kebersihan, dan kesehatan. Permasalahan sampah yang serasa tidak ada habinya di Indonesia ini titik utamanya berada pada pengelolaan sampah. Berbagai macam sampah seperti sampah organik ataupun non organik berasal dari masyarakat sebagai faktor utamanya, untuk sampah organik sebagian berasal dari alam dan sebagian dari masyarakat, akan tetapi untuk seluruh sampah non organik berasal dari masyarakat. Akan tetapi pengelolaan

sampah yang masih terbilang kurang atau pasif, maksudnya masyarakat hanya berpandangan lurus bahwa sampah hanya perlu dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Faktor yang menyebabkan membludaknya timbulan sampah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia pada setiap tahunnya semakin banyak yang berbanding lurus dengan jumlah timbunan produksi sampah. Di Kabupaten Ciamis dalam menangani mengenai permasalahan sampah yang menjadi rumit dikarenakan masyarakatnya yang tidak mempunyai rasa peduli untuk memisahkan sampah organik dan non-organik yang semakin menumpuk, bahkan kebanyakan masyarakat acuh dan tidak peduli tentang banyaknya timbunan sampah dan tidak memperdulikan bahaya yang

diakibatkannya. Sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Timbunan sampah yang didapatkan dari masyarakat yang menjadi sumber utama adanya sampah dilihat dengan satuan volume dan berat. Menurut Damanhuri (2010:24) dalam timbunan sampah baik sekarang ataupun nanti waktu yang akan mendatang adalah sebuah hal yang perlu direncanakan sebagai sistem pengelolaan sampah dengan berat satuan timbunan dilihat dari skala kuantitas setiap individu ataupun rumah masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk serta perkembangan industri yang semakin pesat pada setiap tahunnya dapat memberikan dampak pada jumlah timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat seperti sampah kertas, sampah plastik bahkan sampai sampah yang mengandung bahan yang beracun dan berbahaya. Banyaknya sampah dengan berbagai jenis dari masyarakat disebabkan semakin meningkatnya perekonomian dalam rumah tangga maka akan semakin banyak juga sampah yang dihasilkan dari keluarga tersebut. Selain permasalahan tersebut masih sering dijumpai timbunan sampah yang sengaja dibuang di sungai oleh masyarakat yang mengakibatkan dampak yang negatif kepada masyarakat seperti tercemarnya air bahkan bisa mengakibatkan banjir karena tersumbatnya aliran sungai tersebut.

Berbagai upaya telah Pemerintah lakukan untuk mengurangi debit timbunan sampah yang dilakukan masyarakat sebagai produsen sampah utama, sehingga seharusnya masyarakat

memiliki kesadaran dan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya (*polluters must pay*) contohnya dengan cara pemilihan sampah setiap rumah dengan cara memisahkan antara sampah organik dan anorganik serta mengikuti program menabung sampah di Bank Sampah terdekat. Dengan cara tersebut diharapkan masyarakat rasa tanggung jawabnya semakin meningkat dan semakin besar rasa memiliki (*sense of belonging*) untuk mengelola sampahnya yang merupakan konsep pengelolaan sampah yang benar yaitu dimulai dari akar sumber sampah tersebut yaitu dari rumah masyarakat.

Pada saat ini pengelola kebersihan belum bisa mengatasi seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dikarenakan pola hidup masyarakat yang masih tidak peduli dan tidak mementingkan untuk mengatasi dan mengurangi timbunan sampah yang ada. serta perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi keterbatasan jumlah sumber daya, jumlah anggaran, jumlah pengelola kebersihan, kendaraan personil. Apabila tidak ditangani dengan benar, sampah bisa menimbulkan permasalahan yang cukup serius karena dapat merusak keseimbangan lingkungan dan ekosistem manusia.

Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Ciamis dengan alasan bahwa berdasarkan laporan kinerja dari pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2022 telah mencapai target 76 %, dan telah memperoleh Adipura ke-9 kalinya.

Berdasarkan observasi awal diketahui terdapat beberapa permasalahan di lapangan yang ditemui sebagai berikut :

1. Masih kurangnya partisipasi aktif pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan masih mengandalkan petugas kebersihan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sehingga hal tersebut menjadi tidak seimbang dikarenakan jumlah sampah yang tidak ada hentinya dengan jumlah petugas yang harus mengelola sampah
2. Semakin meningkat jumlah debit sampah tiap tahunnya, sehingga diperlukan cara untuk mengurangi debit atau timbulan sampah.
3. Sampah basah dan sampah kering yang sudah bercampur sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos akan tetapi apabila bercampur dengan sampah yang berbahaya maka kualitas dari kompos tersebut bisa menurun atau bahkan tidak bisa digunakan.
4. Kapasitas TPA yang terbatas dan saat ini dengan adanya proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris maka bisa berdampak pula keberadaan TPA Handapherang karena lokasinya menjadi bagian dari proyek tersebut, sementara debit sampah yang terus menumpuk setiap hari masuk ke TPA dan hanya sebagian saja yang bisa dimanfaatkan kembali oleh pemulung. Apabila terus menerus

jumlah sampah yang terus meningkat dan hanya sedikit yang bisa diolah kembali ada kemungkinan TPA tidak akan mampu menampung jumlah sampah yang lebih banyak. Ketika di suatu wilayah tidak ada petugas TPA dan tidak ada pekerja yang beroperasi satu hari saja maka kemungkinan tumpukan sampah akan tersebar dimana-mana.

5. Beban biaya operasional yang terus meningkat menjadi kendala besar dalam setiap pengangkutan sampah oleh truk ataupun kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA .
6. Keberadaan lokasi Bank Sampah masih belum menyeluruh di setiap desa dan kecamatan dari 175 unit yang terbentuk baru 18 kecamatan dari jumlah 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Mengelola sampah dengan mengikutsertakan peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, bersih, sehat dan bernilai melalui pemilihan Sampah dari Rumah dan program menabung Sampah di Bank Sampah terdekat sehingga pelayanan pengangkutan sampah yang Residu ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat tidak harus dilakukan seterusnya oleh masyarakat akan tetapi pihak lain juga harus ikut berpartisipasi seperti lembaga atau badan negara maupun swasta. Kondisi

ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis”**.

LANDASAN TEORI

Teori Penelitian

Menyikapi berbagai permasalahan pada pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, maka dibutuhkan peran aktif khususnya dari Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (masyarakat dan swasta) dapat lebih maksimal. Prijono dan Pranarka (2006: 72) menjelaskan:

Pemberdayaan merupakan sebuah proses kegiatan belajar dan mengajar yang merupakan bagian dari suatu usaha secara terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara perorangan ataupun berkelompok. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kemampuan pada setiap orang ataupun kelompok tertentu.

Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah yang dikembangkan harus berdasar pada tingkat kesadaran peran serta seluruh pihak baik dari seluruh unsur SKPD, masyarakat serta pihak swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dengan strategi baru agar mewujudkan Kabupaten Ciamis yang bersih, sehat dan bernilai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis *circular economy*, yang bisa membantu dorongan

kepada masyarakat untuk bisa terlibat dan berperan aktif dalam mensukseskan program pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.. Sebagaimana pendapat Soemirat (2017:49) menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bisa dilaksanakan dengan efektif, apabila:

1. Memberikan pengenalan kepada masyarakat mengenai jenis sampah serta metode pembuangannya.
2. Membuat perencanaan kegiatan serta melakukan pengelolaan sampah secara terstruktur dimulai dari pengumpulan kemudian pengangkutan sampai pembuangan akhir.
3. Memisahkan peran pengaturan dan peran pengawasan dari lembaga yang memiliki fungsi operator pemberi layanan, dengan harapan bisa lebih tegas dalam melaksanakan reward dan punishment dalam pelayanan.
4. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang bisa mencapai tujuan program *zero waste* pada masa mendatang, yaitu:
 - a. Melakukan pengurangan sampah (*Reduce*)
 - b. Menggunakan kembali sampah (*Reuse*)
 - c. Mendaur ulang sampah (*Recycle*).
5. Melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah menjadi lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomis untuk menambah bagi bahan buangan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki sebuah arti kemampuan untuk melakukan sesuatu hal tersebut merupakan pengertian Secara etimologis. Pemberdayaan merupakan suatu tahapan untuk mencapai tujuan, apabila dilihat sebagai tahapan maka pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan dalam sebuah kelompok. Sedangkan apabila dilihat sebagai tujuan, pemberdayaan lebih mengarah kepada sebuah keadaan atau hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh sebuah kehendak dan adanya keinginan yang kuat. Hal tersebut tidak hanya bisa mengontrol perilaku dan perbuatan seseorang atau bahkan kemampuan seseorang. Sebuah kehendak bisa saja menentukan sebuah kegiatan yang akan dilakukan, akan tetapi kehendak tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau suatu kegiatan. Kehendak merupakan pemikiran akal atau rasio sedangkan tindakan berlandas kepada pemikiran konatif pada setiap manusia.

Pengelolaan Sampah

sampah adalah sebuah bahan yang sudah tidak digunakan atau sudah dibuang yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat maupun dari alam, pandangan masyarakat tentang sampah merupakan hal yang tidak memiliki nilai ekonomis bahkan dipandang dengan citra yang negatif dikarenakan untuk mengelolanya diperlukan biaya yang cukup besar.

Sedangkan menurut pandangan umum sampah memiliki dua kategori, yaitu sampah limbah padat yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan serta menjadi penyakit. Sedangkan pandangan sampah apabila dilihat dari sumber daya, maka sampah adalah sesuatu yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis, selain itu hal tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat.

Kegiatan mengelola sampah berbasis masyarakat adalah kegiatan yang perlu dipandang penting sebagai bagian dari perencanaan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu untuk melibatkan para pihak terkait, mulai dari para komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha serta organisasi non pemerintah dengan harapan bisa membentuk sebuah ikatan dan menjalankan suatu kerjasama yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing. Dengan kegiatan mengelola sampah seperti ini diharapkan bisa memberikan dorongan kepada masyarakat yang telah terorganisasi dengan baik untuk ikut berperan dalam pengelolaan sampah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar hal tersebut merupakan hak dari pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33

Tahun 2004). Oleh karena itu, anggaran pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perencanaan yang bisa diukur secara rasional yang bisa dicapai dari setiap sumber pendapatannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hak dari Pemerintah daerah yang dapat diakui dalam penambahan nilai kekayaan bersih dalam setiap periode yang bersangkutan. Semua jenis barang dan jasa hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, adalah “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Sumber dari Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa unsur diantaranya:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)
2. Dana Perimbangan
3. hal lain penerimaan yang syah.

Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah total dari Pos Penerimaan Pajak yang berisikan Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisikan hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002:23). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hal yang berkaitan dengan penerimaan anggaran daerah yang berasal dari sumber ekonomi dan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sebuah lokasi peneliti menentukan

keadaan suatu objek yang diteliti untuk kemudian memproses data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis serta Bank Sampah Ciamis.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan saat peneliti ini mulai dilakukan, dari mulai survey awal, penyusunan dan pengajuan judul penelitian, penentuan judul penelitian, verifikasi judul penelitian pada lokasi penelitian, seminar proposal penelitian, revisi proposal penelitian, kegiatan penelitian, penyusunan skripsi, bimbingan skripsi, penyelesaian skripsi, dan yang terakhir sidang skripsi.

Jadwal penelitian dari Bulan November 2023 sampai Bulan Juni 2024 dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, diawali dari tahap penyusunan proposal sampai tahap penyusunan skripsi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif, alasan mengapa memilih penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan masih belum jelas, *holistic*, dinamis, kompleks dan penuh dengan makna sehingga menjadi tidak memungkinkan peneliti menggunakan metode kuantitatif seperti test, ataupun kuisioner, selain itu peneliti juga bertujuan untuk bisa memahami keadaan sosial lebih mendalam, untuk menemukan pola dan teori.

Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan serta tidak berdasarkan kepada jumlah yang orang yang dibutuhkan. Akan tetapi berdasarkan kepada pertimbangan dengan melihat fungsi dan peran yang sesuai fokus penelitian. Adapun sampel purposive (informan) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (KADIS) Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris Dinas (SEKDIS) Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bidang (KABID) Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
4. Kepala UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Wilayah Ciamis;
5. Pimpinan Bank Sampah Ciamis;
6. Perwakilan Bank Sampah Unit di Kabupaten Ciamis sebanyak 3 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya adalah Teknik untuk mengumpulkan data merupakan langkah yang paling penting dalam membuat sebuah penelitian pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai cara, berbagai setting dan berbagai sumber. Teknik pengumpulan dan dimaksudkan agar bisa mendapatkan data yang akurat, relevan serta bisa di

pertanggung jawabkan dalam penelitian teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi; dan
4. triangulasi.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif, dilakukan disaat mengumpulkan data yang sedang berlangsung, dan apabila sudah selesai dilakukan proses pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis mengenai hasil jawaban yang dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai sudah dianalisis akan tetapi belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai maksud dan inti dari penelitian bisa didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis, sudah terlaksana dengan baik pada beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Pengenalan Karakteristik Sampah Metode Pembuangan Sampah sesuai dengan Karakteristiknya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan bahwa Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan sampah, sudah terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Strategi Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya pemilahan dan pengumpulan di lokasi TPS serta pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir di Lokasi TPA. Kebijakan pengelolaan sampah mengacu pada kebijakan pengelolaan sampah provinsi dan kebijakan pengelolaan sampah nasional.

- b. Merencanakan dan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, bahwa kemampuan Pemerintah dalam Pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis sudah terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditandai sudah terbentuknya Bank Sampah Unit sejumlah 278 unit, Bank Sampah Induk sejumlah 2 unit dan Budidaya Maggot sejumlah 54 unit di masyarakat. Adanya Pengembangan dan penerapan

teknologi pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah merupakan suatu keharusan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah

- c. Memisahkan peran dan pengaturan pengawasan dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan bahwa Pengelolaan sampah berbasis pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ciamis, sudah terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditandai pendapatan dari Bank Sampah Induk yang berjumlah 2 unit sebanyak Rp. 150.000.000,00 per tahun sebagai Pengelolaan sampah berbasis pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Dalam memecahkan masalah-masalah yang dimaksud dengan melalui interaksi dan komunikasi, kegiatan perencanaan bersama dengan peran serta aktif masyarakat bisa membantu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan maksud dan tujuan, memahami situasi dan mengidentifikasi solusi.

Selain itu, terdapat hal yang memang belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal, diantaranya sebagai berikut:

- a. merencanakan program yang bisa mencapai program zero waste,

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan bahwa kemampuan pemerintah untuk menerapkan prinsip kemitraan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditandai kurangnya kemitraan yang dijalin dengan stakeholder dalam pengelolaan sampah.

- b. Mengembangkan teknologi pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, bahwa Kemampuan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditandai kurangnya sarana prasana dalam kendaraan pengangkut sampah. Mempengaruhi pertumbuhan kembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dengan lingkungan biotik dan abiotik.

2. Dalam peran Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola Sampah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa hambatan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan anggaran;

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa gambaran mengenai Sumberdaya Manusia dan penganggaran peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, bisa dibilang masih jauh dibawah kebutuhan, sehingga tidak dapat memenuhi rencana untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk melakukan kemitraan dan pemenuhan sarana prasarana bagi aparatur kerja untuk mewujudkan kinerja pengelolaan sampah.

- b. kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Peranngkat Daerah (OPD)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa gambaran mengenai koordinasi seta komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, dapat dikatakan masih belum maksimal. Peran koordinasi dan

komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah semakin menonjol karena merupakan alat untuk menentukan faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan yang direncanakan, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan dalam suatu kebijakan, sebagai sarana ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah.

- c. Keterbatasan sarana prasarana
Kondisi sarana prasarana bagi aparatur kerja dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, masih perlu dioptimalkan, namun jika dilihat dari segi kebutuhan bahwa jumlah ketersediaan sarana prasarana yang tersedia dapat dianggap cukup.
- d. Lemahnya komitmen kemitraan antar stakeholder pada pengelolaan sampah;
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa gambaran mengenai komitmen kemitraan antar stakeholder pada pengelolaan sampah dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, dapat dikatakan masih belum maksimal. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam

mendukung strategi meningkatkan kinerja pengelolaan sampah diantaranya melalui prinsip kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis, sudah terlaksana dengan baik pada beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Pengenalan Karakteristik Sampah
 - b. Metode Pembuangan Sampah sesuai dengan Karakteristiknya
 - c. Merencanakan dan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu
 - d. Memisahkan peran dan pengaturan pengawasan dalam pengelolaan sampahSelain itu, terdapat hal yang memang belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menggalakkan program yang dapat mencapai program zero waste,
 - b. Mengembangkan teknologi pengelolaan.
2. Dalam peran Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola Sampah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa hambatan

di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan anggaran;
- b. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Peran gkat Daerah (OPD)
- c. Keterbatasan sarana prasarana
- d. Lemahnya komitmen kemitraan antar stakeholder pada pengelolaan sampah;

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya. 2003. *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Barone I, Brusco L, Fuqua SAW. *Estrogen receptor mutations and changes in downstream gene expression and signaling*. Clin Cancer Res.2010;16:OF1–7
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat:Jakarta
- C. Rollin Nisworger, Philip E. Fess, Carls Warren, 1992 *Accounting Principles, Terjemahan Hyginus Ruswinarto, Herman Wibowo*, Edisi Keenambelas, Erlangga, Jakarta.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2010) *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I – 2010/2011*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung
- Hartanto, E. (2006). *Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kota Brebes Melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan*. Thesis, Universitas Diponegoro. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang
- Hadiwiyoto, S. 2017. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu. Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat*, Jakarta
- Hendriksen, Eldon S. and Michael F van Brenda. 2000. *Accounting Theory. Jilid 1*. Edisi kelima. Batam: Interaksa
- Makmur .2007. *Inovasi dan Kreativitas Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset,Yogyakarta
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat*. Liberty. Yogyakarta Neuman, W.L. (2003). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*. New York : Pearson Education Inc
- Prijono dan Pranarka . 2006. *Pemberdayaan konsep, Kebijakan dan Implementasi Jakarta/ CSIS*
- Pratiwi (2007). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sirojuzilam..2011. *Regional: Pembangunan Perencanaan, dan Ekonomi*. USU Press. Medan

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung

Suwatno & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suryana, , 2003. *Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta : PT. Salemba Empat

Soemirat. 2017. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*'. Bandung : ALFABETA

Terry, George R dan Leslie W.Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen, penerjemah G.A. Ticoalu*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tjiptono & Diana. 2006, *Total Quality Management*, Edisi 5, Yogyakarta: Penerbit And Tripono,

Tedjo. 2005. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Grasindo

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2018. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wisnu. (2001). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yudoyono, Bambang. 2001. Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sumber Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Jenis Retribusi Jasa Umum

Sumber Peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sumber Jurnal:

1. Penelitian Skripsi Dilla Useva (2020) yang berjudul: "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah", UIN Raden Intan Lampung.
2. Penelitian Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdian (2022) "Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance pada Program Sister City Bandung dan Jepang Dalam Menanggulangi

- Sampah di Kota Bandung”,
Universitas Pasundan, Indonesia
3. Penelitian Yohanes Nanda Setiawan
(2017) “Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat Dengan
Program 3r Reduce, Reuse, Recycle
(Suatu Studi Evaluasi Tentang
Pengelolaan Sampah Berdasarkan
Peraturan Menteri Pu
No.21/Prt/M/2006 Di Kelurahan
Jember Kidul, Kebonsari, Jember
Lor, Kabupaten Jember)”.
Universitas Jember.